



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

1 0A

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
11. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

- tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

38. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 12);
44. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Karangasem
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.717.980.604.576,00, (*Satu triliun tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 456.289.832.412,00, (*Empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah*) yang terdiri, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 324.810.293.132,00 (*Tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah*)
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.255.832.200,00 (*Delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah*)

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.424.995.605,00, (*Sepuluh miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 112.798.711.475,00, (*Seratus dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*)

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 232.810.293.132,00 (*Dua ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah;
 - c. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - f. Pajak barang dan jasa tertentu;
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00. (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*)
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.080.000.000,00. (*Satu miliar delapan puluh juta rupiah*)
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.000.000.000,00. (*Seratus empat miliar rupiah*)
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.800.000.000,00. (*Enam miliar delapan ratus juta rupiah*)
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 23.000.000.000,00. (*Dua puluh tiga miliar rupiah*)
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 115.500.445.884,00. (*Seratus lima belas miliar lima ratus juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*)

- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 36.542.515.708,00. *(Tiga puluh enam miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan rupiah)*
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 37.337.331.540,00. *(Tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah)*

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.255.832.200,00, *(Delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua dua ratus rupiah)* yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.815.768.200,00. *(Lima miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah)*
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 840.064.000,00. *(Delapan ratus empat puluh juta enam puluh empat ribu rupiah)*
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000,00. *(Satu miliar enam ratus juta rupiah)*

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, direncanakan sebesar Rp.10.424.995.605,00 *(Sepuluh miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima rupiah).*

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 112.798.711.475,00, *(Seratus dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)* yang terdiri atas:
- a. Hasil kerja sama Daerah;
 - b. Jasa giro;
 - c. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain; dan
 - d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

7 112

- (2) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.826.213.800,00.
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.826.213.800,00. *(Satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah)*
- (4) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00. *(Sepuluh juta rupiah)*
- (5) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 109.121.278.070,00. *(Seratus sembilan miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah)*

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.259.717.455.744,00, *(Satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)* yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.170.113.362.000,00, *(Satu triliun seratus tujuh puluh miliar seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)*
- (3) Pendapatan transfer Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 89.604.093.744,00. *(Delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)*

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.170.113.362.000,00, *(Satu triliun seratus tujuh puluh miliar seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)* yang terdiri atas :
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 83.992.155.000,00. *(Delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)*

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.500.426.000,00. *(Dua puluh satu miliar lima ratus juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)*
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.759.626.000,00. *(Dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)*
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 809.880.908.000,00. *(Delapan ratus sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah)*
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 232.980.247.000,00. *(Dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)*

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 89.604.093.744,00. *(Delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)* yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil; dan
 - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.204.483.370,00. *(Enam puluh empat miliar dua ratus empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)*
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.399.610.374,00. *(Dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)*

Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp. 1.973.316.420,00. *(Satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh rupiah)*

Pasal 13

Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp. 1.973.316.420,00. *(Satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh rupiah)*

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.803.429.121.925,00, *(Satu triliun Delapan ratus tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)* yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar 1.490.412.292.958,00 *(Satu triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar lima puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)* yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 953.252.694.320,00. *(Sembilan ratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah)*
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 468.232.097.638,00. *(Empat ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).*
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 62.177.501.000,00. *(Enam puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah)*
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.750.000.000,00. *(Enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 953.252.694.320,00 (*Sembilan ratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan PNS;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 587.033.979.930,96. (*Lima ratus delapan puluh tujuh miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah koma sembilan puluh enam*)
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 295.875.211.081,04 (*Dua ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sebelas ribu delapan puluh satu rupiah koma nol empat*)
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.614.887.534,00 (*Tiga puluh dua miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*)
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.431.092.423,00 (*Dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah*)
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.055.600.000,00 (*Satu miliar lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*)

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 468.232.097.638,00 (*Empat ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;

- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.058.949.272,00 (*Delapan puluh miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*)
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.371.210.548,00 (*Seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*)
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.740.505.147,00 (*Tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*)
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 26.275.654.304,00. (*Dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah*)
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.62.177.501.000,00. (*Enam puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah*)
 - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 58.312.154.916,00. (*Lima puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah*)
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.238.412.012,00 (*Empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu dua belas rupiah*)
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 71.151.559.919,00. (*Tujuh puluh satu miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*)

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 62.177.501.000,00 (*Enam puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah*)
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah dana BOS;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. Belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, direncanakan sebesar Rp. 6.258.449.000,00 (*Enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*)
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.040.987.000,00 (*Empat puluh sembilan miliar empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 453.680.000,00 (*Empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*)
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.464.685.000,00 (*Satu miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.959.700.000,00 (*Empat miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*)

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas Belanja bantuan sosial kepada keluarga direncanakan sebesar Rp. 6.750.000.000,00. (*Enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 74.431.281.049,00, (*Tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;

J N A

- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja modal asset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.726.092.060,00 (*Tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam puluh rupiah*)
 - (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.839.939.000,00. (*Lima belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*)
 - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.623.419.989,00 (*Dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*)
 - (5) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 241.830.000,00 (*Dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.726.092.060,00 (*Tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - e. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. Belanja modal alat laboratorium;
 - g. Belanja modal komputer;
 - h. Belanja modal rambu-rambu;
 - i. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - j. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 112.000.000,00 (*Seratus dua belas juta rupiah*)
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.983.000.000,00 (*Empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah*)
- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.023.067.377,00 (*Empat miliar dua puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*)

f a An

- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 283.036.188,00 (*Dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*)
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 108.531.630,00 (*Seratus delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah*)
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.150.757.800,00. (*Satu miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*)
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 744.559.181,00. (*Tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah*)
- (9) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*)
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.328.345.084,00 (*Tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah*)
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.977.794.800,00 (*Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*)

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.839.939.000,00. (*Lima belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.325.939.000,00 (*Sebelas miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*)
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.764.000.000,00 (*Tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah*)

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.623.419.989,00 (*Dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal jaringan ; dan
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.114.544.189,00 (*Dua puluh satu miliar seratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*)
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.418.600.800,00 (*Tiga miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus ribu delapan ratus rupiah*)
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.090.275.000,00 (*Dua miliar sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00

Pasal 24

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, terdiri atas Belanja modal aset tetap lainnya BOSP direncanakan sebesar Rp. 241.830.000,00 (*Dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima ratus juta rupiah*)

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, terdiri atas belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima ratus juta rupiah*)

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp. 236.085.547.918,00 (*Dua ratus tiga puluh enam Miliar delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.298.596.293,00 (*Empat puluh tiga Miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 192.786.951.625,00 (*Seratus sembilan puluh dua Miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*)

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.298.596.293,00 (*Empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 42.225.338.107,00 (*Empat puluh dua miliar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah*)
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.073.258.186,00 (*Satu miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah*)

Pasal 29

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, direncanakan sebesar Rp. 192.786.951.625,00 (*Seratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*)

Pasal 30

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 85.448.517.349,00 (*Delapan puluh lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas bersumber dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 89.448.517.349,00 (*Delapan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*)

Pasal 32

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 89.448.517.349,00, (*Delapan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*) terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD; dan
 - b. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.348.517.349,00 (*Dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*)
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.100.000.000,00 (*Enam puluh tujuh miliar seratus juta rupiah*)

Pasal 33

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*), terdiri atas

Pasal 34

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*).

f RA

Pasal 35

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (85.448.517.349,00) (*Delapan puluh lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 85.448.517.349,00 (*Delapan puluh lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*)

Pasal 36

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perdatentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2024



BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 37

f 11/12/24



KABUPATEN KARANGASEM
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	456.289.832.412,00
4.1.01	Pajak Daerah	324.810.293.132,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	550.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	550.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	550.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.080.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.080.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.080.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	104.000.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	104.000.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	104.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.800.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	6.800.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.800.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	23.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	23.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	115.500.445.884,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	25.620.150.884,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	24.404.104.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.216.046.884,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	20.500.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	20.500.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	62.751.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	37.100.000.000,00
4.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila	14.561.000.000,00
4.1.01.19.03.0004	PBJT-Pondok Wisata	800.000.000,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	240.000.000,00
4.1.01.19.03.0008	PBJT-Pesanggrahan	10.000.000.000,00
4.1.01.19.03.0011	PBJT-Glamping	50.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	100.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	100.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	6.529.295.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	6.529.295.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	36.542.515.708,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	36.542.515.708,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	36.542.515.708,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	37.337.331.540,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	37.337.331.540,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	37.337.331.540,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.255.832.200,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.815.768.200,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	633.041.200,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	633.041.200,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	806.400.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	806.400.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.862.346.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	515.882.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	2.050.008.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.396.358.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	413.981.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	413.981.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	840.064.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakafan Kekayaan Daerah	99.140.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	23.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	1.440.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	4.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	70.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	83.604.000,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	83.604.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.480.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.480.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	14.400.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	14.400.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	472.680.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	472.680.000,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	30.000.000,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	30.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	47.700.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	47.700.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	87.080.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	87.080.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.600.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	800.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	800.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	800.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	800.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.424.995.605,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.424.995.605,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.017.105.145,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.017.105.145,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	407.890.460,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	407.890.460,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	112.798.711.475,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	1.826.213.800,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	1.826.213.800,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	1.826.213.800,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.841.219.605,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.603.928.600,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.603.928.600,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	237.291.005,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	237.291.005,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.000.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.000.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	109.121.278.070,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	109.121.278.070,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	109.121.278.070,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.259.717.455.744,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.170.113.362.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	83.992.155.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	83.992.155.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	83.992.155.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	21.500.426.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	21.500.426.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	21.500.426.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	21.759.626.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	20.582.106.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	802.887.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	18.524.838.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	1.092.220.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	162.161.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.177.520.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	2.631.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	317.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.174.572.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	809.880.908.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	659.760.618.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	659.760.618.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	150.120.290.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	62.167.162.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	49.717.454.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	16.095.888.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	21.539.786.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	232.980.247.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	1.124.124.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	249.978.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	339.442.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	534.704.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	231.856.123.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	73.099.160.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.167.750.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	137.410.535.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	939.750.000,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.335.800.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.259.290.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.532.260.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.566.850.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.591.234.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	457.834.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.604.093.744,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.204.483.370,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.204.483.370,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.446.546.781,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	60.729.544,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	29.697.207.045,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	25.399.610.374,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	25.399.610.374,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	25.399.610.374,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.973.316.420,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.973.316.420,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.973.316.420,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.973.316.420,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.973.316.420,00
	Jumlah Pendapatan	1.717.980.604.676,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.490.412.292.958,00
5.1.01	Belanja Pegawai	953.252.694.320,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	587.033.979.930,96
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	44.093.628.441.476,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	27.704.474.069.876,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	163.891.543.716,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	41.016.513.022,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.527.226.134,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13.489.286.888,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.027.610.076,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.027.610.076,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	33.161.400.888,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.927.316.538,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	9.234.084.350,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	575.442.423.204,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	285.754.823.104,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.896.876.001,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	24.572.435.931,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.581.909.723,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.990.526.208,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.389.428.543,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.922.831.723,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.466.596.820,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	903.576.756,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.526.825,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	350.894.258,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.722.280.304.204,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.773.151.584.904,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.491.287.193,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	101.888.432.650,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	713.093.847,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	30.579.047.850,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	298.365.125.104,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	208.997.793.604,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	893.673.315,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.941.508.438,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.765.087.349,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	176.421.089,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	29.587.521.108.104,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.861.384.581.404,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.243.062.540.304,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.183.220.411,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	19.286.446.245,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	18.843.673.042,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	442.773.203,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	302.960.800,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	302.960.800,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	82.816.189.286,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	64.190.606.766,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	18.625.582.520,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	154.855.768.936,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	30.923.750,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	61.306.875,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.564.805.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	381.032.500,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.094.646.536,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.327.952.553,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.580.463.805,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.379.644.686,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	29.101.989,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	45.320.000,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	383.539.800,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	6.455.012,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.180.200,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.305.000,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	40.000.000,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	42.259.200,00
5.1.01.02.06.0053	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	20.699.050,00
5.1.01.02.06.0055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	255.000,00
5.1.01.02.06.0057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	26.634.000,00
5.1.01.02.06.0063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	113.155.003.310,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	477.000.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.481.558.980,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	21.043.281.690,00
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	3.675.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.614.887.534,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	164.650.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	164.650.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	142.980.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	142.980.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.000.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.000.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.400.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.400.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	900.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	900.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	15.097.156.548,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	111.394.980,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.565.392,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.696.176,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	14.976.500.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.482.100.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.482.100.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	34.218.486,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	34.218.486,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.431.092.423,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	110.208.864,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	110.208.864,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.400.868,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.400.868,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.700.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.700.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.700.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.700.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.240.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.240.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.179,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.179,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.160.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.160.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	240.024,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	240.024,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	720.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	720.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.193.719.488,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.712.500,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	7.745.625,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	780.045.075,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	45.697.500,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	170.840.789,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	841.530.168,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	173.817.543,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	170.330.288,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.055.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	390.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	390.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	665.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	665.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	34.241.923.351,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	34.241.923.351,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	34.241.923.351,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.232.097.638,00
5.1.02.01	Belanja Barang	80.408.948.272,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80.359.139.272,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	904.695.296,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	816.505.232,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.129.254.210,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	112.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	272.956.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	47.528.300,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	58.454.400,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	481.160.563,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.329.462.714,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	136.660.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.603.049.036,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	214.469.312,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.439.101.052,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.501.885.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.949.544.968,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	264.830.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.333.138.108,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	886.123.730,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.415.106.683,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	688.694.300,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	28.088.600,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	662.731.150,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.797.066.386,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.325.769.012,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	42.528.800,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.577.632.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	133.357.920,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.158.013.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	81.144.800,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	38.764.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.606.914.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	573.566.500,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	917.044.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	569.020.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.391.757.600,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	294.632.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	44.553.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	32.636.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	468.671.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	193.376.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	49.500.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	71.000.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	4.800.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	3.450.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	778.700.900,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.700.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.765.473.400,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	185.830.800,00
5.1.02.01.01.0079	Belanja Barang Sampel Pangan	6.685.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	49.810.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	34.350.000,00
5.1.02.01.04.0130	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.460.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	197.021.210.548,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	90.104.788.109,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.717.472.344,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.960.575.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Sakal Ahli, dan Beracara	63.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	4.400.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	116.300.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	462.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.150.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.958.891.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	492.398.600,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.667.108.546,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	472.920.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	630.900.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.216.800.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	321.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	11.100.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	82.400.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	102.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.210.013.400,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	198.300.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.298.103.700,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.262.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.725.996.460,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.355.371.800,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	6.600.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	5.134.944.800,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	213.846.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.323.850.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	275.385.800,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	350.400.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	19.200.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.976.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	39.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	815.088.462,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	18.642.400,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	69.113.960,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	167.860.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	60.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pamotretan	2.798.822.076,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.098.440.500,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.335.423.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.699.782.551,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	536.415.400,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.363.755.879,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	109.834.316,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	500.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	769.838.610,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.920.046.724,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	76.987.300,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	153.918.681,00
5.1.02.02.01.0079	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	57.385.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	483.480.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	192.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Astransi	92.496.505.029,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.519.329.800,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	87.042.223.853,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	772.800.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.419.440.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	214.705.053,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	247.006.323,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	281.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	75.000.000,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	75.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.355.738.790,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	113.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	162.000.000,00
5.1.02.02.04.0053	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	4.500.000,00
5.1.02.02.04.0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	9.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.726.680.990,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	55.950.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52.000.000,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	1.200.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	203.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	205.000.000,00
5.1.02.02.04.0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	133.400.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	288.007.800,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	100.000.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	270.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.939.550.860,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	891.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	180.662.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	172.306.760,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	695.582.100,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	186.000.000,00
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	186.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	336.220.500,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	28.500.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	307.720.500,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	925.557.500,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	8.087.500,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	520.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	190.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	6.470.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	6.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	95.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.582.116.585,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	150.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	595.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.536.118.585,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	201.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.619.407.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.102.767.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	516.640.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.318.328.175,00
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.550.071,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	55.360.000,00
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	205.824.444,00
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	933.795.660,00
5.1.02.02.14.0038	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	120.796.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	82.000.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	32.000.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.740.505.147,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.580.813.806,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	276.170.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	14.925.802,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	18.000.000,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	12.780.440,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.064.714.338,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	311.500.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	121.500.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	152.364.250,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	510.140.672,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	782.739.799,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	11.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	62.863.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	418.524.091,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	60.353.190,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	48.834.400,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	460.442.668,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	157.400.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	13.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	19.000.000,00
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.700.000,00
5.1.02.03.02.0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	6.500.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	35.000.000,00
5.1.02.03.02.0203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	2.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	32.072.360,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	792.899.723,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	105.401.700,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	469.034.302,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	256.067.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	244.986.071,00
5.1.02.03.02.0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	4.900.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	40.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.154.222.910,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.117.309.704,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	30.000.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.964.500.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	212.163.206,00
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	481.500.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	195.000.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	207.250.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	628.500.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	218.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.858.667.344,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.764.914.639,00
5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	41.252.705,00
5.1.02.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	5.000.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	12.500.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	7.000.000,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	5.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	134.801.087,00
5.1.02.03.06.0002	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	8.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	116.801.087,00
5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.275.654.304,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.275.654.304,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.297.256.176,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.304.117.758,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.421.653.500,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	252.626.870,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.083.651.520,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.886.651.520,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.254.400.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	9.809.215.320,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.823.036.200,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	197.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	195.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	58.312.154.916,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	57.565.914.916,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	57.565.914.916,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	554.560.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	539.560.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	191.680.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	191.680.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.238.412.012,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.238.412.012,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.238.412.012,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.151.559.919,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.151.559.919,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.151.559.919,00
5.1.05	Belanja Hibah	62.177.501.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.258.449.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.200.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.200.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.058.449.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.058.449.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	49.040.987.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	45.019.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	45.019.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.023.987.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	410.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	613.987.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.998.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.998.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	453.680.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	441.680.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	441.680.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	12.000.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	12.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.685.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.685.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.685.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	4.959.700.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	149.100.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	149.100.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.505.980.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.505.980.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.304.620.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.304.620.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.750.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	6.750.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	6.750.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	6.750.000.000,00
5,2	BELANJA MODAL	74.431.281.049,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.726.092.060,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	112.000.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	100.000.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	100.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	12.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	12.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.983.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.983.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.500.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	647.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	99.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	195.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.542.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.023.067.377,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.014.537.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.014.537.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.761.630.977,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.722.550.177,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	153.888.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	551.735.500,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.654.200,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	312.633.700,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	19.169.400,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	246.898.900,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	18.972.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	69.485.300,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	9.813.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	102.418.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	37.450.600,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	8.760.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	283.036.188,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	264.354.588,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.789.788,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	208.564.800,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	19.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	30.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	18.681.600,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	18.681.600,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	108.531.630,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.992.630,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.992.630,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	101.539.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	101.539.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.150.757.800,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	390.757.800,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	390.757.800,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	760.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	300.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	460.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	744.559.181,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	636.022.880,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	36.600.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	389.607.380,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	209.815.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	108.536.301,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	78.536.301,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	15.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	15.000.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	15.000.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	17.328.345.084,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	17.232.435.084,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	17.232.435.084,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	59.950.000,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	59.950.000,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	35.960.000,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	35.960.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.977.794.800,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.977.794.800,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.977.794.800,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.839.939.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	11.325.939.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.325.939.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.816.735.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	233.000.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	15.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.237.704.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	442.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.393.500.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garas/Pool	1.005.000.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	228.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	955.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.764.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.764.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	3.764.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	750.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	750.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	750.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.823.419.989,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	21.114.544.189,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	21.114.544.189,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	21.114.544.189,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.418.600.800,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.700.000.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.700.000.000,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	718.600.800,00
5.2.04.02.05.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	618.600.800,00
5.2.04.02.05.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	100.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.090.275.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	950.500.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	950.500.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.139.775.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.139.775.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	-
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	-
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	241.830.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	100.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	100.000.000,00
5.2.05.02.01.0002	Belanja Modal Lukisan	100.000.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	141.830.000,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	141.830.000,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	141.830.000,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	236.085.547.918,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	43.298.596.293,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	42.225.338.107,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	42.225.338.107,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	42.225.338.107,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.073.258.186,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.073.258.186,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.073.258.186,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	192.786.951.625,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	192.786.951.625,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	103.934.796.625,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	103.934.796.625,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	88.852.155.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	4.860.000.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	83.992.155.000,00
	Jumlah Belanja	1.803.429.121.925,00
	Total Surplus/(Defisit)	- 85.448.617.349,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	89.448.517.349,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.448.517.349,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	22.348.517.349,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	22.348.517.349,00
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	6.500.000.000,00
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	5.000.000.000,00
6.1.01.01.01.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.348.517.349,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.500.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	67.100.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	46.100.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	22.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	4.500.000.000,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	15.600.000.000,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	2.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	2.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	21.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	10.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	11.000.000.000,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	85.448.517.349,00
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-

Kab. Karangasem, 30 Desember 2024

Bupati



I Gede Dana